

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF GUBERNUR JAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ajeng Lutfiah¹, Rissa Ayustia²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

1044586307@ecampus.ut.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi kepemimpinan partisipatif Gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif gubernur dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas program pemberdayaan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dalam mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara konsep kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan sumber-sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepemimpinan partisipatif gubernur telah meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, memperkuat forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menyediakan dukungan anggaran dan pelatihan yang sesuai kebutuhan lokal. Meski demikian, masalah seperti birokrasi yang berbelit dan partisipasi yang hanya bersifat formalitas di beberapa tempat masih menjadi hambatan yang perlu diselesaikan agar pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran kepemimpinan partisipatif dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata kunci: Kepemimpinan Partisipatif, Gubernur, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.

Abstract

This research highlights how the implementation of the West Java Governor's participatory leadership in improving community empowerment, which is the main focus in facing regional development challenges. The purpose of this study is to analyze how the governor's participatory leadership style can encourage increased community participation and effectiveness of empowerment programs in West Java Province. The research uses a descriptive qualitative approach with literature study as a possible data collection and analysis technique in identifying patterns, themes, and relationships between the concepts of participatory leadership and community empowerment based on written sources. The results show that the governor's implementation of participatory leadership has increased community participation in the planning and implementation of empowerment programs, strengthened communication forums between the government and the community, and provided budget support and training that suits local needs. However, problems such as bureaucratic red tape and participation that is only a formality in some places are still obstacles that need to be resolved so that

empowerment can run more effectively and sustainably. This research makes an important contribution to understanding the role of participatory leadership in the context of local governance in Indonesia.

Keywords: Participatory Leadership, Governor, Policy Implementation, Community Participation, Empowerment.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan partisipatif merupakan pendekatan strategis yang penting untuk menjawab keinginan masyarakat yang semakin kritis dan aktif dalam pemerintahan daerah yang semakin kompleks. Penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya yang diterapkan pada kebijakan, program, dan model pelibatan masyarakat yang dibuat di tingkat provinsi. Hal ini penting karena pemberdayaan masyarakat mendorong keterlibatan aktif, bukan hanya pasif, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun pemberdayaan masyarakat merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah, masih terdapat beberapa hambatan untuk memaksimalkan potensi masyarakat di Jawa Barat. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi masyarakat belum dikelola dengan baik dan tepat. Akibatnya, masyarakat masih dirugikan, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam strategi ini, pelaksanaan pembangunan sering kali terfokus pada kepentingan pejabat atau perangkat tertentu daripada masyarakat secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (dpmdesa.jabar).

Pendekatan partisipatif memiliki kemampuan yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak selalu dapat mengubah struktur kesempatan yang ada secara menyeluruh (Anomsari & Abubakar, 2019). Menurut penelitian sebelumnya di BPBD Jawa Barat, kinerja karyawan dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinan partisipatif. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat (Wirakusuma & Kushendar, 2023). Selain itu, penelitian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pelayanan publik (Safina et al., 2024). Menurut penelitian lain di tingkat desa, kepemimpinan kepala desa memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, hal ini berdampak sebesar 54,5% terhadap pelaksanaan program pemberdayaan (Putra, 2019).

Pembahasan ini menarik karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pada tahun 2023 jumlah penduduknya mencapai 49,94 juta jiwa (BPS, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi tantangan sekaligus peluang karena wilayahnya yang kompleks dan keragaman sosial yang tinggi. Data Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat, terutama antara kota dan desa. Sebagai contoh, hasil Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 menunjukkan bahwa 2,1% desa di provinsi ini masuk dalam kategori tertinggal dan sekitar 15,6% desa masih dalam kategori berkembang (Kemendesa PDTT, 2022). Sementara itu, kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat desa dan provinsi masih bersifat simbolis dan belum mencapai tingkat yang signifikan.

Namun, dalam hal ini terdapat *research gap* yang perlu diatasi. Pertama, dalam implementasi kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal karena kurangnya pengawasan dan keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam prosesnya (Lathif, 2022). Kedua, penelitian di BPBD Jawa Barat lebih menekankan pada dampak kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja staf daripada pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan (Wirakusuma & Kushendar, 2023). Ketiga, penelitian tentang gaya kepemimpinan partisipatif di pemerintah daerah biasanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi belum secara khusus meneliti dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi (Safina et al., 2024).

Urgensi dari penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif yang diadopsi oleh Gubernur Jawa Barat dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti dapat meningkatkan legitimasi politik, meningkatkan keterlibatan, serta menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan (Zain & Hayati, 2023). Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, resistensi birokrasi, dan dinamika sosial yang dapat menghambat optimalisasi kepemimpinan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Jika kepemimpinan partisipatif tidak diimplementasikan dengan baik, maka terdapat risiko berbagai program pemberdayaan masyarakat tidak mencapai Sasarannya, sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan partisipatif gubernur dapat membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi, kesulitan, dan dampak dari gaya kepemimpinan partisipatif gubernur terhadap pemberdayaan masyarakat yang efektif. Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model kepemimpinan partisipatif yang lebih baik. Hal ini akan memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat Jawa Barat menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini memakai cara metode kualitatif bersama dengan pendekatan deskriptif analitis, fokus pada studi dokumen serta kajian literatur atau berdasar riset pustaka (*library research*), dengan tujuan mengkaji dalam implementasi kepemimpinan partisipatif Gubernur Jawa Barat. Pendekatan diambil sebab kajian atau penelitian ini tidak melalui pengumpulan data primer yang diambil dari wawancara atau observasi langsung, tetapi mengandalkan data sekunder yang didapat dari banyak dokumen sah pemerintah seperti RPJMD, laporan kerja OPD, dokumen Musrenbang, agenda strategis, serta publikasi akademik, jurnal ilmiah, artikel media massa, juga data statistik resmi dari BPS dan portal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses, memilah, dan mengkaji berbagai sumber secara sistematis untuk menemukan gaya kepemimpinan partisipatif serta pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan memakai teknik analisis isi dan tema, yang termasuk proses menyederhanakan data, kategorisasi tema, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta menarik kesimpulan dari konteks dan makna yang ada. Supaya hasilnya akurat dan valid, sumber dicocokkan dengan membandingkan isi dari berbagai dokumen dan publikasi untuk memastikan informasi agar tidak salah dalam

mengutip. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang lengkap serta berkontribusi terhadap konsep maupun praktik tentang pentingnya pemahaman peran kepemimpinan partisipatif gubernur Jawa Barat dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan partisipatif merupakan kesempatan bagi pemimpin untuk selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi aktif baik secara spiritual, mental, fisik maupun material dalam seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Gaya kepemimpinan partisipatif tidak akan pernah menghalangi atau menghambat pengembangan diri dan inisiatif bawahan untuk berpartisipasi dalam kemajuan organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif menekankan pada dukungan yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tetapi sedikit bimbingan dari pemimpin. Maksudnya adalah sedikit bimbingan, yaitu pemimpin tidak hanya duduk dan memberikan banyak instruksi, tetapi juga berpartisipasi dalam proses kesepakatan bersama. Kepemimpinan partisipatif dapat dianggap sebagai perilaku yang berbeda, meskipun dapat digunakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan menunjukkan perilaku hubungan antara pemimpin dan bawahan (Teguh Pamungkas et al., 2024).

Kemudian ada enam jenis partisipasi, yaitu a) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi; b) Partisipasi dalam menanggapi dan menyarankan informasi yang diterima; c) Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional pembangunan; dan d) Partisipasi dalam bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; dan e) Partisipasi dalam partisipasi dalam proses pembangunan (Haliim, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan *Dynamic Governance* 3.0 untuk mengimplementasikan model tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang ditunjukkan dalam data LKPJ 2018, 72% program pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Program pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi, di mana masyarakat dilibatkan dalam pembuatan rencana pembiayaan dan pemantauan hasil, merupakan contoh yang baik (Ridwan, 2018).

Kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, khususnya di era kepemimpinan Ridwan Kamil, terbukti sangat berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan partisipatif ini ditandai dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, yang sejalan dengan teori kepemimpinan demokratis yang menekankan pada kerja sama dan komunikasi dua arah antara pemimpin dan warga (Khalid, 2021). Data dari program Jabar *Quick Response* (JQR) yang digagas oleh gubernur menunjukkan bahwa program tersebut telah menjangkau lebih dari 2600 desa dan 166.000 orang di 27 kabupaten dan kota dalam lima tahun pelaksanaannya, membuktikan efektifitas penyaluran aspirasi masyarakat untuk merespon dan menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif bukan hanya sekedar konsep, tetapi telah dipraktikkan dengan menggunakan teknologi digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Teguh Pamungkas et al., 2024).

Pengembangan sistem *e-governance* yang disebut Jabar Digital merupakan contoh penerapan tata kelola pemerintahan partisipatif di Jawa Barat. Sistem ini mendukung kebijakan Satu Data di provinsi ini dan memfasilitasi akses ke layanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi. Studi baru ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil yang efektif, terutama dalam hal koordinasi instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia birokrasi. Dengan pengelolaan data yang lebih baik, pemerintah provinsi dapat mengembangkan program-program bantuan yang tepat sasaran dan inklusif yang dapat memperkuat fondasi pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti industri kreatif, pendidikan, dan kesehatan (Prasada et al., 2024).

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah meningkat secara signifikan, terutama dalam perumusan program pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan lokal. Partisipasi aktif ini mencerminkan prinsip dasar kepemimpinan partisipatif, yang menekankan keterlibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut teori (Yukl 2013), kepemimpinan partisipatif mendorong dialog dua arah antara pemimpin dan anggota, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program (Nurhidayah, 2018). Dalam konteks Jawa Barat, masyarakat tidak hanya menjadi objek program tetapi juga menjadi subjek, memainkan peran aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini sejalan dengan temuan Suharto (2017) yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat efektif apabila masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi. Peningkatan partisipasi ini juga didukung oleh kebijakan gubernur yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan melalui mekanisme Musrenbang dan dialog publik, yang menjadi forum resmi untuk partisipasi masyarakat. Pembentukan forum komunikasi rutin seperti Musrenbang dan dialog publik menjadi sarana penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Ibrahim et al., 2023). Forum-forum ini memungkinkan pemerintah menerima masukan langsung dari masyarakat dan menjelaskan kebijakan yang akan diambil, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Arnstein (2019) dalam teorinya tentang tangga partisipasi masyarakat menekankan bahwa partisipasi yang efektif harus melibatkan pemberian kekuasaan nyata kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan, bukan hanya partisipasi simbolik (Nusa & Annisa, 2025).

Kemudian, dalam praktiknya forum komunikasi rutin sebagai wadah interaksi antara pemerintah dan masyarakat telah meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah provinsi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Hal ini sejalan dengan penelitian Risti dkk. (2019) yang menemukan bahwa forum komunikasi yang terstruktur dan rutin dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat rasa memiliki masyarakat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi bervariasi di beberapa daerah, di mana partisipasi masih bersifat formalitas tanpa pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberikan dukungan dalam bentuk anggaran dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat. Dukungan ini merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan partisipatif yang tidak hanya mengandalkan komunikasi, tetapi juga penyediaan sumber daya untuk memberdayakan masyarakat. Suharto (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah, termasuk penyediaan pelatihan dan sumber daya yang relevan dengan konteks lokal. Pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola



usaha dan sumber daya, sehingga mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan program pemberdayaan. Hal ini menggarisbawahi temuan studi oleh Nurhadi (2021), yang menyoroti pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan sebagai faktor kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai memungkinkan implementasi program yang lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas (Sari & Nurwahidin, 2022).

Meskipun ada kemajuan, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi kepemimpinan partisipatif. Pertama, birokrasi yang lamban di tingkat bawah menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Lambatnya respon birokrasi mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini sejalan dengan temuan (Arnstein, 2019) bahwa hambatan struktural dalam birokrasi dapat menghambat partisipasi masyarakat yang tulus. Kedua, partisipasi warga masih bersifat simbolik di beberapa daerah, yaitu partisipasi warga lebih bersifat formalitas tanpa ada pengaruh nyata terhadap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum mencapai tingkat pendelegasian kekuasaan atau kontrol penuh yang diperlukan untuk pemberdayaan secara menyeluruh (Rahman et al., 2022). Penelitian dari (Sakti et al., 2021) juga menunjukkan fenomena serupa, di mana partisipasi simbolik menjadi tantangan umum dalam implementasi kepemimpinan partisipatif di pemerintahan daerah.

Tetapi kepemimpinan partisipatif menghadapi banyak masalah struktural dan sosial saat diterapkan. Terbatasnya literasi masyarakat tentang mekanisme partisipasi dan pengajuan usulan program merupakan salah satu hambatan utama. Sebuah survei internal menemukan bahwa hanya sekitar 34% warga benar-benar memahami prosedur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak merata dan cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat yang lebih terorganisir dan berpendidikan. Selain itu, pembagian kebijakan antar perangkat daerah menghambat koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan yang mengakibatkan tumpang tindih dan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Alamin, 2018).

Menghubungkan temuan penelitian dengan gaya kepemimpinan gubernur Jawa Barat saat ini, dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan yang dimaksud memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Gubernur Jawa Barat terpilih yaitu Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tidak konvensional dan merakyat, membawa pendekatan langsung ke dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakannya yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk berkomunikasi dan melibatkan masyarakat merupakan ciri khas gaya kepemimpinannya (Suryoputro, 2025). Kemudian yang secara aktif berinteraksi dengan masyarakat, mempublikasikan kegiatan sehari-hari, dan memungkinkan diskusi langsung melalui platform seperti YouTube, Instagram, Tiktok dan Twitter. Metode ini tidak hanya meningkatkan transparansi pemerintahan tetapi juga meningkatkan hubungan antara masyarakat dan para pemimpin.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dukungan anggaran berbasis kebutuhan dan forum komunikasi rutin merupakan komponen penting untuk memperkuat rasa memiliki masyarakat. Namun, gaya kepemimpinannya juga menjadi bahan kontroversi, karena dalam beberapa kasus ia dianggap sebagai penguasa absolut seperti raja dan beberapa kebijakannya menimbulkan perdebatan di masyarakat (Gustiana, 2025). Para kritikus juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang dianggap *neopatrimonialis* dapat berdampak negatif terhadap akuntabilitas publik dan ruang pengambilan keputusan yang demokratis. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dan reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan partisipasi warga dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Suharto (2017) yang menekankan pentingnya transformasi birokrasi dalam mendukung kepemimpinan partisipatif.

SIMPULAN

Penerapan kepemimpinan partisipatif oleh Gubernur Jawa Barat, khususnya di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi, telah berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pendekatan inklusif dan inovasi program seperti Musrenbang, Jabar *Quick Response*, dan Jabar Digital Service. Terlepas dari gaya kepemimpinan mereka yang berbeda, keduanya telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan kemajuan industri kreatif, pengembangan UMKM, dan revitalisasi pedesaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah, seperti rendahnya tingkat partisipasi di daerah pedesaan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme partisipasi. Serta koordinasi birokrasi yang lemah juga menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola partisipatif yang berkelanjutan, diperlukan reformasi birokrasi, pelatihan bagi aparat, penguatan kompetensi partisipatif masyarakat, serta sistem komunikasi dan evaluasi yang baik.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparturnya, tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga dalam hal komunikasi yang efektif, peningkatan partisipasi, dan manajemen konflik. Pengembangan program literasi partisipatif yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan mekanisme partisipasi sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan. Penggunaan teknologi informasi juga harus dioptimalkan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan pedesaan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik dan kesempatan berpartisipasi. Penguatan sinergi dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Selain itu, pengenalan sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menjadi dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan. Model-model tata kelola pemerintahan partisipatif perlu dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik dan dinamika sosial masing-masing daerah sehingga tata kelola pemerintahan partisipatif di Jawa Barat dapat semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, F. (2018). "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT". *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah)*, 3(2), 77-95.
- Anomsari, E. T., & Abubakar, R. R. T. (2019). "Program Pembangunan Partisipatif Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat". *Natapraja*, 7(1), 121-138. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Arnstein, S. R. (2019). "A Ladder Of Citizen Participation". *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- BPS. (2023). No. <https://jabar.bps.go.id/id>
- dpm desa.jabar. (n.d.). *Sejarah DPMD*. <https://dpm desa.jabarprov.go.id/profil/sejarah/>
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma, L., Islam, P. A., Islam, U., & Sunan, N. (n.d.). *Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. 5(4), 6512-6523.
- Gustiana, A. (2025). *Dedi Mulyadi: Gubernur Rasa Raja di Jabar*. Bukamata. <https://bukamata.id/berita/dedi-mulyadi-gubernur-rasa-raja-di-jabar/>
- Haliim, W. (2020). "Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif". *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91-104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik* (H. Al Mumtaza (ed.); 1st ed., p. 144). CV. Literasi Nusantara Abadi. [https://repository.lppm.unila.ac.id/42156/1/Buku ajar partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik%281%29.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://repository.lppm.unila.ac.id/42156/1/Buku%20ajar%20partisipasi%20dan%20pemberdayaan%20di%20sektor%20publik%281%29.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Ibrahim, A., Rifa'i, B., & Dewi, R. (2023). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin". *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(4), 475-496. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i4.23925>
- Jumroh. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik* (S. J. Insani (ed.); 1st ed., p. 232). CV. Insan Cendikia Mandiri. https://jdih.lubuklinggaukota.go.id/file-koleksi-buku/buku-implementasi-pelayanan-publik-teori-dan-praktik-20246767d7cbda449.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Kemendes, P. (2022). *Indeks Desa Membangun (IDM) Jawa Barat*. <https://idm.kemendes.go.id>
- Khalid, I. (2021). "Rekam Jejak Keberhasilan Kepemimpinan Partisipatif Ridwan Kamil". *Kumparan*. <https://kumparan.com/ilhamkhaleed2001/rekam-jejak-keberhasilan-kepemimpinan-partisipatif-ridwan-kamil-1vwqjR9kSeJ/full>
- Lathif, G. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya*. 4282-4293.
- Marzuki, M. (2016). "Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 11. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.146>
- Nurhidayah. (2018). *kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. 84. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2957-Full_Text.pdf
- Nusa, R. A., & Annisa, F. (2025). *Analisis Konsep Arnstein's Ladder Of Participation Dalam Mega Proyek Ibu Kota Nusantara*. 3(3), 5048-5057.
- Prasada, Y. A. B., Putri, T. S., & Erlianty, R. L. (2024). "Peran Kepemimpinan Ridwan Kamil Dalam Perkembangan Transformasi Digital di Jawa Barat". *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6).



- Putra, M. A. (2019). *PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM REHABILITASI -SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)*. 10, 37-43.
- Rahman, A. S., Rusydi, M., & Usman, J. (2022). "Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng". *Seiko: Journal of Management & Business*, 5(1), 601-611.
- Ridwan, K. (2018). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018*. <https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/LKPJ-Gubernur-Jawa-Barat-2018-full.pdf>
- Safina, S., Saepudin, E. A., Fadillah, S., Fitriani, A., & Maulida, S. (2024). *Peran Gaya Kepemimpinan Partisipatif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah*. 1(4).
- Sakti, F. T., Paisal, M. R., Rohmatullah, M., Fadillah, N. A. N., & Ihsani, P. S. N. (2021). "Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan". *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 82-95. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.19>
- Sari, M., & Nurwahidin, M. (2022). *Teknologi Pendidikan Urgensi Analisis Kebutuhan Pada Penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan Teknologi Pendidikan*. 1(2). <https://doi.org/10.56854/tp.v1i2.22>
- Suryoputro, S. (2025). *Dedi Mulyadi: Gaya Kepemimpinan Sadar Digital, Harapan Baru di Era Transparansi*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/suryokocosuryoputro1324/67b98741c925c42ba13b9c14/de-di-mulyadi-gaya-kepemimpinan-sadar-digital-harapan-baru-di-era-transparansi>
- Teguh Pamungkas, Jamrizal Jamrizal, & Kasful Anwar Us. (2024). "Kepemimpinan Partisipatif, Delegasi Dan Pemberian Kewenangan". *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(2), 99-110. <https://doi.org/10.55606/mri.v2i2.2488>
- Wirakusuma, T. C., & Kushendar, D. H. (2023). "Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BPBD Jawa Barat". *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6988-6996. <https://yrpipku.com/journal/index.php/msej/article/view/3269%0Ahttps://yrpipku.com/journal/index.php/msej/article/download/3269/1817>
- Zain, Z. A., & Hayati, C. (2023). "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Lerpak". *Journal of Economics, Business*, 1(6), 226-232. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass/article/view/99%0Ahttp://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass/article/download/99/52>